

## **Pemutusan Hubungan Kerjasama Militer Swedia Terhadap Arab Saudi (2014-2015)**

**Fatkhul Adli dan Ali Maksum<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mendorong Swedia dalam memutuskan kerjasama militer dengan Arab Saudi dan kepentingan nasional Swedia dibalik kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara menjelaskan berdasarkan data yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, surat kaba dan juga dokumentasi yang dapat diakses dari internet. Penulis menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa hukuman cambuk yang dijatuhkan Arab Saudi terhadap blogger Raef Badawi dianggap dapat mengancam kepentingan nasional Swedia dalam menegakkan hak asasi manusia serta adanya desakan dari dua partai koalisi yang berkuasa yaitu partai demokrat sosial dan partai hijau setelah pidato menteri luar negeri Swedia diblokir oleh Arab Saudi pada pertemuan Liga Arab.*

*Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, kerjasama militer, kepentingan nasional, hak asasi manusia*

### **Latar Belakang**

Swedia merupakan negara kecil di Eropa Barat yang memiliki industri persenjataan cukup besar. Pada tahun 2013 sendiri, industri pertahanan Swedia mengeksport peralatan militer senilai kurang lebih 2 miliar (Jarlen & jonsson, 2015). Menurut SIPRI Arms Transfer Database, Swedia adalah eksportir senjata terbesar ke-11 untuk periode 2010-2014 dan menyumbang 2% dari pengiriman dunia (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015). Sekitar 78% dari ekspor Swedia pergi ke negara-negara Uni Eropa dan negara mitra tradisional seperti Kanada, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. 22% lainnya dari total nilai ekspor

pergi ke beberapa negara seperti Thailand, India dan Arab Saudi, Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015).

Swedia sendiri bukanlah pemain baru dalam bidang ini walaupun hanya memiliki pasar yang tidak terlalu besar dalam perdagangan persenjataan global. Sejarah mengatakan bahwa Swedia telah lama bergelut dalam bidang militer. Swedia sendiri mengambil sebuah keputusan strategis setelah selesainya Perang Dunia II yang berdampak pada industri senjata Swedia. Pemerintah menganggap perlu untuk memiliki industri persenjataan yang besar dan maju untuk menghindari ketergantungan pada negara lain, yang pada saat krisis dapat membahayakan status netral negara tersebut (Stenlas, 2008). Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung perusahaan senjata Swedia dengan cara persenjataan negara diambil dari industri persenjataan dalam negeri. Pada tahun 1960'an, sebanyak 90% dari semua peralatan yang berhubungan dengan militer dikembangkan dan diproduksi di Swedia. Tetapi karena anggaran militer negara itu menurun selama bertahun-tahun, mengekspor senjata menjadi cara untuk membiayai pengembangan dan produksi senjata di Swedia. Hal ini telah menciptakan hubungan khusus antara industri senjata dan pemerintah Swedia di mana pemerintah berkontribusi untuk memfasilitasi ekspor senjata untuk menegakkan industri nasional dan untuk alasan keamanan lainnya. Pada tahun 2000 Badan Ekspor Pertahanan dan Keamanan Swedia didirikan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mempromosikan ekspor senjata Swedia ke luar negeri. Tetapi Badan Ekspor Pertahanan dan Keamanan Swedia ini akhirnya ditutup pada tahun 2015 untuk diserahkan ke *Swedish Defence Materiel Administration* (Gerome, 2016).

Saat ini mayoritas dari semua produksi persenjataan di Swedia diekspor ke luar negeri. Ekspor persenjataan hanya 1% dari dari keseluruhan ekspor Swedia. Pada 1990-an, banyak perusahaan produsen senjata yang dimiliki Swedia sebelumnya dijual ke perusahaan asing (Bromley & Wezeman, 2013). Namun demikian, aktor dominan di pasar adalah SAAB yang masih dimiliki oleh Swedia, memegang hampir 50% dari pangsa pasar (Bromley & Wezeman, 2013). Aktor utama lainnya adalah BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds, dan Nammo Sweden (Gerome, 2016).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Swedia menjadi salah satu negara yang sangat diminati oleh banyak negara dalam kerjasama militer. Perkembangan teknologi militer Swedia menjadi incaran dari banyak negara, mulai dari Amerika, Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, Asia, dan kawasan Afrika. Tetapi dalam sebuah hubungan kerjasama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan diplomatik antar negara akan berjalan naik turun seiring perkembangan perpolitikan yang ada dalam dunia internasional. Begitu pula hubungan Swedia dengan Arab Saudi, sebuah kerjasama yang sudah terjalin sangat lama antara Swedia dengan Arab Saudi dalam kerjasama militer ini tidak menjamin bahwa hubungan diantara kedua negara akan selalu berjalan dengan baik.

Pada tahun 2015, dunia internasional khususnya Uni Eropa dikagetkan dengan keputusan Swedia untuk tidak lagi melanjutkan perjanjian kerjasama militernya dengan Arab Saudi. padahal Arab Saudi dan Swedia sudah lama menjalin kerjasama ini yaitu mulai dari tahun 2005 (Bershidsky, 2014) dan di luar

pasar Eropa, Arab Saudi menjadi pasar ke-3 terbesar dalam perdagangan senjata Swedia (Dickson, 2015).

### **Kerangka Pemikiran**

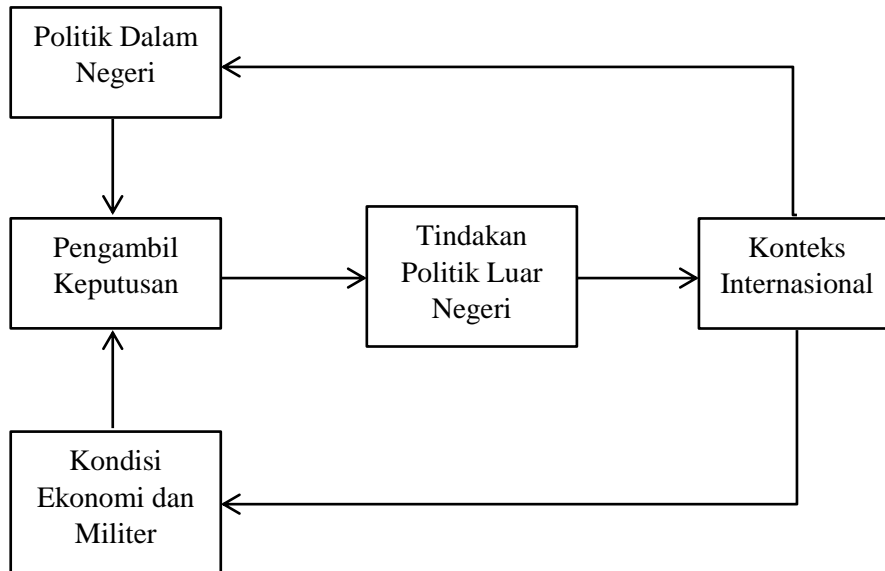
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin. Teori ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan luar negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya (Coplin, 2003, hal. 30) menyatakan:

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan permasalahan yang dihadapi)”

Agar dapat lebih memahaminya Wiliam D. Coplin menjelaskannya dalam bentuk interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin**



Sumber: (Coplin, 2013)

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Kondisi politik dalam negeri

Coplin mengatakan bahwa untuk menentukan cara kerja kebijakan luar negeri, dapat diamati dari situasi domestik suatu negara. Situasi politik internal dalam sebuah negara memberikan pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

2. Kapasitas ekonomi dan militer

Menurut Coplin, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat ditentukan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Kemampuan ekonomi dan

militer negara memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri mereka karena kemampuan ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri

### 3. Konteks internasional

Konteks internasional adalah situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan pertimbangan dalam membuat keputusan luar negeri. Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu, geografis, ekonomis dan politis.

## **Metode Penelitian**

### **- Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang berusaha untuk menyelidiki, memahami, dan kemudian menjelaskan atau menganalisa suatu gejala yang diteliti dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Penjelasan atas gejala yang diteliti tersebut tentu dilakukan melalui penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Proses penyusunan ini memiliki substansi analitis dan interpretatif dalam setiap penjelasannya. Penelitian ini menggunakan data sebagai bukti dalam menguji kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis. Data yang muncul berwujud kata-kata, dan bukan rangkaian angka (Narbuko & Achmadi, 2012).

### **- Sifat penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana penulis berusaha untuk mendapat uraian yang menggambarkan suatu

kolektifitas dengan syarat bahwa representasi harus terjamin. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan melukiskan reaksi social yang kompleks dan sedemikian rupa sehingga relevansinya tercapai. Penelitian ini akan memanfaatkan dan menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi mengklasifikasikan gejala-gejala sosial yang dipersoalkan (Nawawi, 1987).

- **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan referensi-referensi ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Data yang diperoleh dari sumber-sumber buku ini, menjadi bagian inti yang berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi**

Pada akhir tahun 2014 Arab Saudi telah menghukum seorang blogger dan juga aktivis Raif Badawi yang menurutnya telah menghina Islam. Dia ditangkap pada tahun 2012 dengan tuduhan menghina Islam melalui saluran elektronik dan dibawa ke pengadilan atas beberapa tuduhan termasuk pemurtadan. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan 600 cambukan pada tahun 2013 (About Raif Badawi, 2017), kemudian pada tahun 2014 Raif Badawi menerima hukuman tambahan yaitu menerima 1000 cambukan dan 10 tahun penjara ditambah denda (Agerholm, 2016).

Arab Saudi sendiri memiliki peraturan undang-undang untuk tidak memberikan kebebasan berekspresi, termasuk untuk pers. Undang-undang dasar menetapkan bahwa “media massa dan semua sarana untuk berekspresi lainnya harus menggunakan bahasa yang sopan, berkontribusi terhadap pendidikan bangsa dan memperkuat persatuan. Media dilarang untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan, mempengaruhi keamanan negara atau hubungan pemerintah dengan publik, merusak martabat dan hak asasi manusia.” (Saudi Arabia 2017 human rights report, 2017). Pihak berwenang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menentukan pidato atau ekspresi berpendapat mana yang melemahkan keamanan internal. Pemerintah dapat melarang atau menangguhkan saluran media jika menyimpulkan bahwa mereka melanggar undang-undang pers dan publikasi dan memantau serta memblokir ratusan ribu internet. Ada banyak laporan tentang pembatasan kebebasan berekspresi (Saudi Arabia, 2016).

Raif Badawi sendiri memiliki situs web Free Saudi Liberals yang mempromosikan sekularisme, kebebasan berbicara dan sesekali menyindir secara sarkastik terhadap kelompok keras religius Arab Saudi. banyak tulisan-tulisan Raif Badawi yang membuat Arab Saudi marah dan menjatuhkan hukuman kepada blogger tersebut (Hopper, 2018).

Swedia sendiri adalah negara yang berbanding terbalik dengan Arab Saudi. Swedia memiliki sejarah yang sangat kental dengan hak asasi manusianya. Pada tahun 2014 sendiri Swedia telah menetapkan kebijakan luar negeri feminis. Dengan keluarnya kebijakan luar negeri ini Swedia menjadi satu-satunya negara yang



menganut kebijakan feminis. Penetapan kebijakan luar negeri feminis ini dikatakan oleh menteri luar negeri Swedia Margot Wallstrom bertujuan agar Perempuan dan laki-laki dapat memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri.

Setelah diterapkannya kebijakan luar negeri feminis ini, sudah bisa kita lihat kebijakan yang diambil oleh swedia dalam berhubungan dengan dunia internasional yaitu Swedia telah mengakui Palestina sebagai negara. Menurutnya, Palestina memiliki hak untuk menjadi negara yang merdeka dan kekerasan akibat perang antara Israel dan Palestina akibat perebutan tanah ini berdampak pada banyaknya korban warga sipil, anak-anak, perempuan, hancurnya bangunan-bangunan seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Swedia juga mengkritik Arab Saudi sebagai inegara mitranya karena menurutnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya yang dikritik oleh Swedia terhadap Arab Saudi adalah dalam kasusnya Raif Badawi yang sudah dijelaskan di atas. Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengatakan bahwa hukuman seperti ini harus segera dihentikan.



**Margot Wallström** ✓  
@margotwallstrom

Follow



Blogger Raif Badawi was flogged today in Saudi Arabia. This cruel attempt to silence modern forms of expression has to be stopped.

6:24 AM - 9 Jan 2015

Swedia sendiri telah melakukan kerjasama militer dengan Arab Saudi sejak tahun 2005 yang pada akhirnya kerjasama ini tidak dilanjutkan oleh Swedia pada tahun 2015. Swedia melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Arab Saudi terhadap Raif Badawi adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan tujuan Swedia. Hal ini akan membahayakan kepentingan Swedia dalam mencapai tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia. Swedia sendiri merasa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi akan terus berjalan dan akan memakan banyak korban lainnya. Maka dengan melihat kondisi yang seperti ini, Swedia masih menimbang ulang apakah perjanjian kerjasama militer ini akan dilanjutkan atau tidak. Hal ini menjadi pertimbangan Swedia untuk mengkaji ulang kepentingan Swedia dalam kerjasama militer dengan Arab Saudi.

### **Pemblokiran pidato Menteri Luar Negeri Swedia di pertemuan Liga Arab**

Setelah Swedia menetapkan kebijakan luar negeri feminisnya, pemerintah Swedia yang baru telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk secara resmi mengakui negara palestina dan menjadikannya negara Uni Eropa bagian barat pertama yang melakukannya. Dengan reputasi Swedia sebagai broker yang jujur dalam urusan internasional dan dengan memiliki suara yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, keputusan ini mungkin akan dapat mempengaruhi negara-negara Uni Eropa lainnya (Beaumont, 2014).

Menteri luar negeri Swedia Margot Wallstrom akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa Swedia mengakui negara Palestina pada 30 Oktober 2014. dalam pengumumannya ini Margot Wallstrom mengatakan bahwa keputusan ini

adalah sebuah langkah penting yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri (Beaumont, 2014). Wallstrom berharap bahwa keputusan yang diambil oleh Swedia ini dapat diikuti oleh negara-negara lainnya. Pemerintah Swedia menganggap bahwa kriteria hukum internasional dalam mendirikan negara yaitu wilayah, warga negara, dan pemerintah telah terpenuhi (Kershner, 2014). Swedia berharap bahwa keputusannya ini juga akan dapat memfasilitasi perjanjian damai dengan membuat pihak-pihak lainnya ikut andil dalam mendukung Palestina dan memberikan kontribusi untuk memberikan harapan pada Palestina pada saat ketegangan meningkat (Beaumont, 2014).

Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya menyambut baik keputusan yang diambil oleh Swedia dengan mengundang Swedia sebagai tamu kehormatan untuk datang dalam pertemuan Liga Arab yang diadakan pada 9 Maret 2015 di Kairo, Mesir. Menteri Luar negeri Margot Wallstrom telah diundang untuk memberikan pidato pada pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab dan perjalanan ini bertujuan untuk membangun kerja sama untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia dan integritas ekonomi (Ahlander & Sennero, 2015).

Tetapi dalam pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab ini pidato yang akan disampaikan oleh Margot Wallstrom di blokir oleh Arab Saudi yang bereaksi keras terhadap posisi pemerintahnya pada demokrasi dan hak asasi manusia. Wallstrom mengatakan bahwa kemungkinan pemblokiran pidatonya yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah karena Swedia telah menyoroti situasi demokrasi dan hak asasi manusia.

*“The explanation we have been given is that Sweden has highlighted the situation for democracy and human rights, and that is why they do not want me to speak. It’s a shame that a country has blocked my participation.”*

Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom sendiri sebelumnya telah mengomentari terkait hak asasi manusia yang ada di Arab Saudi. dia menentang hukuman “abad pertengahan” terhadap blogger Raif Badawi yang dijatuhi hukuman 1000 cambukan dan 10 tahun penjara karena telah menghina Islam (Crouch, 2015). Dia juga telah memperjuangkan kebijakan luar negeri feminis yang harus mencakup penguatan hak-hak perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perspektif gender tentang bagaimana sumber daya dialokasikan (Crouch, 2015).

Dengan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom dalam pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo membuat hubungan kedua negara memanas. Swedia merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Pada tahun yang sama ini Swedia juga memiliki hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi yang harus diperpanjang pada bulan mei 2015 (Galih, 2015). Hubungan kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Tetapi akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap pidato Menteri Luar Negeri Swedia di Liga Arab membuat perpanjangan perjanjian kersama militer ini dikecam di dalam partai Wallstrom sendiri yaitu partai demokrat sosial dan juga oleh mitra koalisinya partai hijau (Patnistik, 2015). Pada akhirnya setelah didesak oleh dua partai tersebut, Perdana Menteri Swedia Steven Lofen memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang

kontrak perjanjian kerjasama militer ini dengan Arab Saudi sehari setelah Arab Saudi memblokir pidato Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom yang diundang sebagai tamu kehormatan di pertemuan para menteri luar negeri Arab di Kairo.

### **Kesimpulan**

Arab Saudi merupakan negara yang belum demokratis dan menggunakan hukum syariah sebagai dasar hukum di negaranya. Penerapan hukum syariah ini menjadikan Arab Saudi masih menggunakan sistem hukuman yang dikatakan oleh Swedia sebagai hukuman abad pertengahan. Hal ini dialami oleh seorang blogger Raif Badawi yang mendapatkan hukuman cambuk oleh kerajaan Arab Saudi setelah dianggap telah menghina Islam. Hal ini mendapatkan kritikan oleh Swedia karena menurutnya hukuman seperti ini telah melanggar hak asasi manusia yang Swedia sendiri adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kritikan yang dilakukan oleh Swedia terhadap Arab Saudi ini akhirnya berbuntut panjang yang memanaskan hubungan antara ke dua negara ini. dalam pertemuan Liga Arab di Kairo sendiri Swedia diundang untuk memberikan pidatonya terkait dengan keputusannya mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Tetapi karena kekecewaan Arab Saudi terhadap Swedia atas kritikan terhadap urusan internalnya membuat Saudi memblokir pidato menteri luar negeri Swedia tersebut. Kejadian ini membuat hubungan kedua negara semakin panas karena Swedia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. sehari setelah terjadinya pemblokiran pidato menteri luar negeri Swedia, Swedia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi dengan alasan terjadinya pemblokiran pidato menteri luar negeri Swedia di

pertemuan Liga Arab dan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi yang hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Swedia tentang hak asasi manusia terlebih lagi Swedia telah menetapkan kebijakn luar negeri feminis.

### **Daftar Pustaka**

*About Raif Badawi.* (2017). Retrieved November 14, 2018, from Raid Badawi Web site: <https://www.raifbadawi.org/about-raif-badawi/all-about-raif-badawi.html>

Agerholm, H. (2016). *Raif Badawi: Atheist Saudi blogger faces further round of lashes, supporters say.* Retrieved November 14, 2018, from Independent Web site: <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/raif-badawi-atheist-saudi-blogger-faces-further-round-lashes-supporters-say-public-flogging-human-a7372976.html>

Ahlander, J., & Sennero, J. (2015). *Saudis block Swedish minister's speech at Arab League.* Retrieved November 16, 2018, from Reuters Web site: <https://www.reuters.com/article/us-sweden-saudi/saudis-block-swedish-ministers-speech-at-arab-league-idUSKBN0M50ZS20150309?feedType=RSS&feedName=worldNews>

Beaumont, P. (2014). *Sweden officially recognises state of Palestine.* Retrieved November 11, 2018, from The Guardian Web site: <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/sweden-officially-recognises-state-palestine>

Beaumont, P. (2014). *Sweden to recognise state of Palestine.* Retrieved November 11, 2018, from The Guardian Web site: <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/03/sweden-recognise-state-palestine>

Berman, G. E. (2011). Small Arms Transfers: Exporting States. *Small Arms Survey Research Notes Weapons & Markets, XI*, 1-2.

Bershidsky, L. (2014). *Sweden 'caved to banker' in Saudi arms deal.* Dipetik Oktober 16, 2018, dari The local Web site: <https://www.thelocal.se/2014/0818/saudi-affair-sweden-caves-to-banker-arms-weapons>

Bromley, M. S., & Wezeman, S. (2013). Current trends in the international arms trade and implications for Sweden. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

Chase, S. (2016). *Despite Dion's rhetoric, Sweden says it hasn't suffered from cancelling Saudi arms deal.* Retrieved November 21, 2018, from The globe

and mail Web site: <https://www.theglobeandmail.com/news/politics/dion-cites-swedish-example-in-defence-of-saudi-arms-deal/article30072877/>

Coplin, D. W., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

Crouch, D. (2015). *Saudi Arabia recalls ambassador to Sweden as diplomatic row deepens*. Retrieved November 16, 2018, from The Guardian Web site: <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/10/sweden-tears-up-arms-agreement-with-saudi-arabia-over-blocked-speech>

Crouch, D. (2015). *Swedish frustration with Saudis over speech may jeopardise arms agreement*. Retrieved November 16, 2018, from The Guardian Web site: <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/09/swedish-foreign-minister-margot-wallstrom-saudi-arabia-blocked-speech-human-rights>

Dickson, D. (2015). *Sweden to end defence agreement with Saudi Arabia*. (S. Johnson, & K. Liffey, Editor) Dipetik Agustus 29, 2018, dari Reuters Web site: <https://www.reuters.com/article/sweden-saudi-defence/sweden-to-end-defence-agreement-with-saudi-arabia-idUSL5N0WC4MO20150310>

Ericson, H., & Larsson, M. (2013). *The Military Industrial Complex and Patents of the Swedish Armament Industry –the Case of Bofors*.

Freeman, D. P., Fleurant, D. A., Wezeman, D. P., & Wezeman, S. T. (2015). *Trends in world military expenditure, 2014*, SIPRI Fact Sheet, March. Stockholm.

Galih, B. (2015). *Hubungan Memanas, Swedia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Arab Saudi*. Dipetik Oktober 17, 2018, dari Kompas Web site: <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/12/05065861/Hubungan.Memanas.Swedia.Hentikan.Kerja.Sama.Militer.dengan.Arab.Saudi>

Gerome, R. (2016). *Preventing Gender-Based Violence Through Arms Control - Case Study The Swedish Arms Trade and Risk Assessments: Does a Feminist Foreign Policy Make a Difference?*. Jenawa: Women's International League for Peace and Freedom

Hopper, T. (2018). *What did Raif Badawi write to get Saudi Arabia so angry?* Retrieved November 14, 2018, from National Post Web site: <https://nationalpost.com/news/canada/what-did-raif-badawi-write-to-get-saudi-arabia-so-angry>

Jarlen, J., & Jonsson, R. (2015). *The Defense Industry; Controversial but Profitable*. Gothenburg: University of Gothenburg School of Business, Economics and Law.

Kershner, I. (2014). *Sweden Gives Recognition to Palestinians*. Retrieved November 16, 2018, from The New York Times Web site: <https://www.nyti>

mes.com/2014/10/31/world/europe/sweden-recognizes-palestinian-state.html

Nawawi, H. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Patnistik, E. (2015). *Menteri Swedia "Dibungkam" Saudi di Liga Arab*. Dipetik Oktober 17, 2018, dari Kompas Web site: <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/09/20164241/Menteri.Swedia.Dibungkam.Saudi.di.Liga.Arab>

Patnistik, E. (2015). *Menteri Swedia "Dibungkam" Saudi di Liga Arab*. Retrieved November 16, 2018, from Kompas Web site: <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/09/20164241/Menteri.Swedia.Dibungkam.Saudi.di.Liga.Arab>

*Saudi Arabia*. (2016). Retrieved November 14, 2018, from Human rights watch Web site: <https://www.hrw.org/sites/default/files/saudiarabia.pdf>

*Saudi Arabia 2017 human rights report*. (2017). Retrieved November 14, 2018, from U.S. Department of State Web site: [www.state.gov/documents/organization/277507.pdf](http://www.state.gov/documents/organization/277507.pdf)

SIPRI. (2016). *SIPRI Arms Transfers Database - Methodology*. Dipetik September 24, 2018, dari SIPRI Web site: <https://www.sipri.org/databases/armstransfers/background>

Stenlas, N. (2008). *Technology, National Identity and the State Rise and Decline of a Small State's Military Industrial Complex*. Holländargatan: Institute for Future Studies.

*Sweden recognises Palestine and increases aid*. (2014). Retrieved November 16, 2018, from Swedish Government Web site: <https://www.government.se/press-releases/2014/10/sweden-recognises-palestine-and-increases-aid/>